

Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusa  
t Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pus  
at Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pu  
sat Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi P  
usat Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi  
Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi Informas  
i Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi Informa  
si Pusa  
asi Pus  
masi P  
rmasi I  
ormas  
formasi  
nformasi Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi  
Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat Komis  
i Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat Komi  
si Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat Kom  
isi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat Ko  
misi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat K  
omisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat  
Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusa  
t Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pus  
at Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pu

**SEKRETARIAT KOMISI  
INFORMASI PUSAT**  
LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2019  
**AUDITED**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2019  
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat,

ttd

Bambang Sigit Nugroho  
NIP 196109231991031001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	

**SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**  
**WISMA BSG LT. 9**  
**JL. ABDUL MUIS NO. 40 JAKARTA PUSAT**  
**TELEPON 021 34830741, FAXIMILE 021 34531734**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2019  
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat,  
ttd

Bambang Sigit Nugroho  
NIP 196109231991031001

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.033.780,- atau mencapai 0,0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp21.614.463.873,- atau mencapai 98,37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.972.110.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp708.400.051,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp154.255.574,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp536.331.977,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp17.812.500,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp340.955.837,- dan Rp367.444.214,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp21.925.697.769

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp21.925.697.769,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp8.615.101,- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp21.917.082.668,-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp674.096.789,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp21.917.082.668,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21.610.430.093,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp367.444.214,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	4.033.780	#DIV/0!
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	4.033.780	#DIV/0!
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>			
Belanja Pegawai	B.3	4.952.535.000	4.709.040.091	95,08
Belanja Barang	B.4	16.697.775.000	16.584.774.282	99,32
Belanja Modal	B.5	321.800.000	320.649.500	99,64
Belanja Bantuan Sosial		-	-	#DIV/0!
<b>JUMLAH BELANJA</b>		21.972.110.000	21.614.463.873	98,37

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## II. NERACA

### SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	1.377.418	478.780
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C.3	152.878.156	123.816.439
Jumlah Aset Lancar		<b>154.255.574</b>	<b>124.295.219</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	3.669.720.716	3.665.753.566
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.5	49.473.000	49.473.000
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(3.182.861.739)	(3.189.861.378)
Jumlah Aset Tetap		<b>536.331.977</b>	<b>525.365.188</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.7	266.949.999	232.149.999
Aset Lain-Lain	C.8	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(249.137.499)	(194.006.249)
Jumlah Aset Lainnya		<b>17.812.500</b>	<b>38.143.750</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>708.400.051</b>	<b>687.804.157</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	340.955.837	13.707.368
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>340.955.837</b>	<b>13.707.368</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>340.955.837</b>	<b>13.707.368</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.11	367.444.214	674.096.789
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>367.444.214</b>	<b>674.096.789</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>708.400.051</b>	<b>687.804.157</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



### III. LAPORAN OPERASIONAL

## SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

URAIAN	CATATAN	2019	2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	5.016.246.620	3.382.219.765
Beban Persediaan	D.3	409.649.384	591.221.227
Beban Barang dan Jasa	D.4	10.856.526.157	7.688.237.709
Beban Pemeliharaan	D.5	325.699.437	402.159.752
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.987.562.210	4.136.906.912
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	330.013.961	502.396.466
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>21.925.697.769</b>	<b>16.703.141.831</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(21.925.697.769)</b>	<b>(16.703.141.831)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.8		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		3.000.000	67.615.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	(205.889.400)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(626.729)	(151.702)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.241.830	4.339.313
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>8.615.101</b>	<b>(134.086.789)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(21.917.082.668)</b>	<b>(16.837.228.620)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.9		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(21.917.082.668)</b>	<b>(16.837.228.620)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2019	2018
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	674.096.789	1.164.330.079
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(21.917.082.668)	<b>(16.837.228.620)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		(21.242.985.879)	(15.672.898.541)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	21.610.430.093	<b>16.346.995.330</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>367.444.214</b>	<b>674.096.789</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi publik di badan publik tingkat pusat. Organisasi dan tata kerja entitas diatur oleh Undang undang nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/037/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Entitas berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas dan fungsi dalam Memutuskan sengketa informasi publik serta memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian dan Lembaga yang berstatus Badan Publik dapat membuka informasi publiknya kepada Masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut guna mendukung pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Komisi Informasi Pusat berkomitmen dengan visi “**mewujudkan Keterbukaan informasi publik di badan publik, agar tercapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga yang berkelanjutan.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga pembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi ( PPID).
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

*Basis  
Akuntansi*

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kominfo yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai



nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, *Sekretariat Komisi Informasi Pusat* melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 7 kali. Revisi pertama dan kedua di tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena pemutahiran data POK, revisi ketiga di tingkat DJA terkait penambahan Pagu untuk kekurangan Belanja Pegawai, revisi keempat di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan Pergeseran dari Output Prioritas Nasional untuk memenuhi Belanja Operasional dalam hal ini kenaikan Honorarium PPNPN, revisi kelima dan keenam di tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena pemutakhiran data POK, revisi ketujuh di tingkat DJA karena pergeseran dari Non Operasional ke Belanja Gaji untuk pemenuhan Belanja Gaji Komsioner Komisi Informasi Pusat. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:



Uraian	2109	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>	-	-
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.311.417.000	4.952.535.000
Belanja Barang	16.366.783.000	16.697.775.000
Belanja Modal	321.800.000	321.800.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>21.972.110.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp4.033.790*

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.033.790 atau mencapai 0 persen karena tidak ada anggaran pendapatan. Pendapatan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri dari Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan	-	3.000.000	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	1.033.780	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	-	<b>4.033.780</b>	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan lain-lain TA 2019 mengalami penurunan 94,34 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain dari penurunan Pendapatan dari Penjualan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan	3.000.000	67.615.000	-95,56
Pendapatan Lain-lain	1.033.780	3.705.228	-72,10
<b>Jumlah</b>	<b>4.033.780</b>	<b>71.320.228</b>	<b>-94,34</b>

*Realisasi*

*Belanja Negara*

*Rp21.614.463.873*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp21.614.463.873,- atau 98,37% dari anggaran belanja sebesar Rp21.972.110.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019*

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.952.535.000	4.709.040.091	95,08
Belanja Barang	16.697.775.000	16.584.774.282	99,32
Belanja Modal	321.800.000	320.649.500	99,64
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>21.972.110.000</b>	<b>21.614.463.873</b>	<b>98,37</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>21.972.110.000</b>	<b>21.614.463.873</b>	<b>98,37</b>

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami Kenaikan sebesar 24,04% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat dukungan penuh dari pimpinan dalam mengoptimalkan program atau kegiatan Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Rencana Kerja, kenaikan gaji pegawai PNS dan PPNPN, serta melaksanakan pengawalan Pemilu Tahun 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.709.040.091	3.369.234.186	39,77
Belanja Barang	16.584.774.282	12.797.308.873	29,60
Belanja Modal	320.649.500	251.772.499	27,36
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>21.614.463.873</b>	<b>16.418.315.558</b>	<b>31,65</b>

*Belanja  
Pegawai  
Rp4.709.040.0  
91,-*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 4.709.040.091,- dan Rp3.369.231.186,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami Kenaikan sebesar 31,65 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terdapat penambahan 4 orang CPNS,

kenaikan gaji Komisioner, serta kenaikan gaji dan tunjangan kinerja PNS.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.174.308.134	1.099.069.791	6,85
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	2.486.600.000	1.123.600.000	121,31
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Tunj. Khusus & B Transito	1.049.428.560	1.146.564.478	(8,47)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.710.336.694</b>	<b>3.369.234.269</b>	<b>39,80</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.296.603)	(83)	#####
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.709.040.091</b>	<b>3.369.234.186</b>	<b>39,77</b>

*Belanja  
Barang  
Rp16.584.774.282,-*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.584.774.282,- dan Rp12.797.308.873,-. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan 29,60 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini terjadi karena program kerja yang direncanakan pada TA 2019 dapat dilaksanakan seluruhnya dan terdapat kenaikan gaji PPNPN.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.503.608.964	2.516.833.428	39,21
Belanja Barang Non Operasional	1.498.941.698	1.364.167.293	9,88
Belanja Jasa	5.853.975.495	3.807.236.988	53,76
Belanja Pemeliharaan	308.918.054	400.308.252	(22,83)
Belanja Barang Persediaan	434.179.000	571.856.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.789.026.068	4.136.906.912	15,76
Belanja Perjalanan Luar Negeri	205.399.365	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.594.048.644</b>	<b>12.797.308.873</b>	<b>29,67%</b>
Pengembalian Belanja	(9.274.362)	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.584.774.282</b>	<b>12.797.308.873</b>	<b>29,60%</b>

**B.5 Belanja Modal**

*Belanja Modal  
Rp 320.649.500*

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp320.649.500,- dan Rp251.772.499,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami Kenaikan sebesar 27,36% dibandingkan TA 2018 hal ini terjadi karena adanya peningkatan realisasi belanja modal di TA 2019. Realisasi penyerapan anggaran belanja modal meningkat dari 98,78 persen pada TA 2018 menjadi 99,64 persen pada TA 2019.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.849.500	212.272.500	34,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	34.800.000	39.499.999	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>320.649.500</b>	<b>251.772.499</b>	<b>27,36</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>320.649.500</b>	<b>251.772.499</b>	<b>27,36</b>

### **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp 0*

#### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara

per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2017
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No. Rekening 032901002931306	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Belanja  
Dibayar di  
Muka  
Rp1.377.418,-*

### **C.2 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.377.418,- dan Rp478.780,-. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018*

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pot.Kehadiran Tunkin bln Des 2019	921.668	478.780
Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bln Des 2019	455.750	
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.377.418</b>	<b>478.780</b>

### **C.3 Persediaan**

*Persediaan*  
*Rp152.878.156*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp152.878.156,- dan Rp 123.816.439,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018*

Jenis	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	152.878.156	123.288.439
Barang untuk Pemeliharaan	-	528.000
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>152.878.156</b>	<b>123.816.439</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Peralatan dan*  
*Mesin*  
*Rp3.669.720.716*

**C.4 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp3.669.720.716,- dan Rp3.665.753.566,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>3.665.753.566</b>
Mutasi tambah:	
Penggunaan kembali	0
Pembelian	294.759.500
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	290.792.350
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>3.669.720.716</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-3.182.861.739
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>486.858.977</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian 7 buah Lemari Besi/Metal senilai Rp1.920.000,-
- b. Pembelian 2 buah Rak Besi senilai Rp2.660.000,-
- c. Pembelian 3 buah Mesin Absensi senilai Rp14.150.500,-
- d. Pembelian 2 buah Meja Kerja Kayu senilai Rp6.600.000,-
- e. Pembelian 9 buah Kursi Besi/Metal senilai Rp17.550.000
- f. Pembelian 3 buah Sice senilai Rp64.850.000,-
- g. Pembelian 1 buah Meja Rapat senilai Rp2.780.000,-
- h. Pembelian 1 buah Kitchen Set senilai Rp1.500.000,-
- i. Pembelian 1 buah Chairman/Audio Conference senilai Rp71.500.000,-
- j. Pembelian 1 buah Camera Digital senilai Rp10.612.000,-
- k. Pembelian 11 buah Notebook senilai Rp85.143.000,-
- l. Pembelian 4 buah Printer senilai Rp11.008.000,-



- m. Pembelian 1 buah Scanner senilai Rp4.486.000,-  
Mutasi pengurangan peralatan dan mesin berupa;
- a. Penghentian penggunaan 1 unit LCD Projector/Infocus senilai Rp5.375.000,-
  - b. Penghentian penggunaan 1 unit Meja Kerja Kayu senilai Rp11.202.400,-
  - c. Penghentian penggunaan 7 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp6.717.700,-
  - d. Penghentian penggunaan 4 buah Meja Rapat senilai Rp12.567.200,-
  - e. Penghentian penggunaan 9 buah AC Split senilai Rp45.212.000,-
  - f. Penghentian penggunaan 2 unit Tape Recorder senilai Rp10.050.000,-
  - g. Penghentian penggunaan 1 unit DVD Player senilai Rp1.870.000,-
  - h. Penghentian penggunaan 1 unit Chairman/Audio Conference senilai Rp16.888.500,-
  - i. Penghentian penggunaan 1 unit Camera Digital senilai Rp24.800.000,-
  - j. Penghentian penggunaan 1 unit LCD Monitor senilai Rp1.575.000,-
  - k. Penghentian penggunaan 7 unit P.C Unit senilai Rp68.718.000,-
  - l. Penghentian penggunaan 8 unit Notebook senilai Rp85.141.550,-
  - m. Penghentian penggunaan 2 unit Wireless Access Point senilai Rp910.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp49.473.000*

### **C.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp49.473.000 dan Rp49.473.000,-. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan Aset Tetap Lainnya. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>49.473.000</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>49.473.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>49.473.000</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp3.182.861.739,  
-*

### **C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp3.182.861.739,- Rp3.189.861.378,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2019*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.669.720.716	3.182.861.739	486.858.977
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	49.473.000	0	49.473.000
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>3.719.193.716</b>	<b>3.182.861.739</b>	<b>536.331.977</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp266.949.999  
9,-*

**C.7 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp266.949.999,- dan Rp232.149.999,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Satker Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>232.149.999</b>
Mutasi tambah:	34.800.000
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>266.949.999</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(249.137.499)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>17.812.500</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2019*

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	266.949.999
	0
<b>Jumlah</b>	<b>266.949.999</b>

*Aset Lain-Lain  
Rp0*

**C.8 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
- Penghentian penggunaan	-
- Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	-
- Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	-

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp249.137.499,  
-*

**C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp234.137.499,- dan Rp194.006.249,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	266.949.999	249.137.499	17.812.500
<b>Jumlah</b>	<b>266.949.999</b>	<b>249.137.499</b>	<b>17.812.500</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>266.949.999</b>	<b>249.137.499</b>	<b>17.812.500</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp340.955.837,-*

**C.10 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp340.955.837,- dan Rp 13.707.368,-. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah uang makan, tunjangan, dan gaji susulan tambahan PNS yang diangkat pada Bulan Desember 2019 serta kenaikan gaji dan tunjangan PNS dari April 2019 yang ditetapkan pada Bulan Februari 2020, dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Tagihan CC Pemakaian BBM Bln Des 2019	18.664.522	Tagihan kepada Pihak Bank BRI untuk pembayaran Kartu Kredit Bln Des 2019
Kekurangan Gaji Pokok Bln Des 2019 untuk 2 orang Pegawai PNS	920.720	Kekurangan Gaji 2 orang PNS TMT 1 Desember 2019
Pembulatan Gaji	22	Pembulatan kekurangan gaji
Kekurangan Pembayaran Selisih Kekurangan Tunkin	321.370.573	Rapel Selisih Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Set. KIP
<b>Total</b>	<b>340.955.837</b>	

#### Ekuitas

Rp367.444.214,-

#### C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp367.444.214,- dan Rp674.096.789,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### Pendapatan PNB

Rp 0

#### D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

##### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

### Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tidak terdapat Pendapatan Jasa maupun Pendapatan lain-lain pada Laporan Operasional Tahun 2019 maupun Tahun 2018.

*Beban  
Pegawai  
Rp5.016.246.  
620,-*

#### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.016.246.620,- dan Rp3.382.219.765,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan Beban Pegawai sebesar 48,31 % terdapat kenaikan gaji Komisioner, penambahan CPNS sejumlah 4 orang, serta kenaikan gaji dan tunjangan PNS.

#### *Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	845.196.213	787.916.930	7,27
Beban Tunjangan-tunjangan	319.257.742	319.932.337	-0,21
Beban Honorarium dan Vakasi	2.486.600.000	1.123.600.000	121,31
Beban Pegawai(Tunj.Khusus/kegiatan)	1.365.192.665	1.150.770.498	18,63
<b>Jumlah</b>	<b>5.016.246.620</b>	<b>3.382.219.765</b>	<b>48,31%</b>

*Beban  
Persediaan*

#### **D.3 Beban Persediaan**

*Rp406.649.384* Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp406.649.384,- dan Rp591.221.227. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	409.649.384	591.221.227	-30,71
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>409.649.384</b>	<b>591.221.227</b>	<b>-30,71</b>

*Beban  
Barang dan  
Jasa  
Rp10.856.526.157,-*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.856.526.157,- dan Rp7.688.237.709,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:



*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	3.317.064.716	2.348.094.428	41,27
Beban Jasa Pos dan Giro	7.534.248	15.479.000	(51,33)
Beban Honor	601.994.000	328.674.200	83,16
Beban Barang	298.126.350	804.661.685	(62,95)
Beban Bahan	777.831.348	384.091.408	102,51
Beban Langganan dan daya	86.660.499	88.544.188	(2,13)
Beban Sewa	4.935.671.706	3.405.932.800	44,91
Beban Jasa Konsultan	142.313.200	0	-
Beban Jasa Profesi	465.300.000	312.760.000	48,77
Beban Jasa Lainnya	224.030.090	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.856.526.157</b>	<b>7.688.237.709</b>	<b>41,21</b>

*Beban Pemeliharaan Rp325.699.437,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp325.699.437,- dan Rp402.159.752,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	325.171.437	402.159.752	(19,14)
Beban Pemeliharaan Lainnya	528.000	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>325.699.437</b>	<b>402.159.752</b>	<b>19,01%</b>

*Beban Perjalanan Dinas Rp4.987.562.210,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.987.562.210,- dan Rp 4.136.906.912,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban

Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.339.802.029	1.242.656.923	7,82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147.056.000	314.275.000	-53,21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	352.856.000	429.353.905	-17,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.942.448.816	2.150.621.084	36,82
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	205.399.365		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>4.987.562.210</b>	<b>4.136.906.912</b>	<b>20,56%</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp330.013.961,-*

**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp330.013.961,- dan Rp502.396.466,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2019 dan 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274.882.711	323.612.724	(15,06)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	-	114.996.243	(100,00)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>274.882.711</b>	<b>438.608.967</b>	<b>(37,33)</b>
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	55.131.250	63.787.499	(13,57)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>55.131.250</b>	<b>63.787.499</b>	<b>(13,57)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>330.013.961</b>	<b>502.396.466</b>	<b>-34,31%</b>

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp8.615.101,-*

#### **D.8 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut;

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.000.000	67.615.000	-0,96
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	(205.889.400)	-1,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	6.241.830	4.339.313	0,44
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	(626.729)	(151.702)	3,13
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)			
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>8.615.101</b>	<b>-134.086.789</b>	<b>-106,43%</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

#### **D.9 Pos Luar Biasa**

*Pos Luar  
Biasa Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa TA 2019 dan 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp674.096.789,  
-*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp674.096.789,- dan Rp1.164.330.079,-.

*Defisit LO  
Rp21.917.082.6  
68,-*

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp21.917.082.668,- dan Rp16.837.228.620,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian*      **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

*Nilai Aset*

*Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*      **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

*Persediaan*

*Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih*      **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi*

*Aset Tetap*

*Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0*

#### **E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset tetap non Revaluasi	-
Aset lainnya non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Lain-  
Lain Rp0*

#### **E.3.5 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Rincian Koreksi lain-lain adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi  
Antar Entitas  
Rp21.610.430.0  
93,-*

#### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.610.430.093,- dan Rp16.346.995.330,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(4.033.780)
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.614.463.873
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>21.610.430.093</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar (Rp4.033.780,-) sedangkan DKEL sebesar Rp21.614.463.873,-.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
3	Persediaan		-
	<b>Jumlah</b>		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0 .

### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,- dari yang diterima sepanjang tahun 2019..

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

## **Ekuitas Akhir**

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp367.444.214,-



**Rp367.444.214,- dan Rp674.096.789,-.**

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada tanggal 22 Januari 2020 ditetapkan Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan tunjangan kinerja PNS di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang semula 70% menjadi 80% terhitung mulai Bulan April 2019 sesuai dengan keputusan peraturan tersebut. Dari peraturan tersebut sehingga menimbulkan Belanja yang Masih Harus Dibayar.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat terjadi kenaikan honorarium Komisioner. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/539/M/PAN-RB/03/2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal Persetujuan Prinsip Pemberian Honorarium Bagi Anggota Komisi Informasi Pusat besaran Honorarium honorarium Anggota Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut;

- Ketua Rp 14.375.000,-
- Wakil Ketua Rp 13.250.000,-
- Anggota Rp 12.500.000,-

Pada Tahun 2019 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat terhitung sejak 23 Januari 2019 menyebutkan bahwa Honorarium Anggota Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut;

- Ketua Rp 25.200.000,-
- Wakil Ketua Rp 24.000.000,-
- Anggota Rp 23.950.000,-

Honorarium tersebut belum termasuk pajak penghasilan. Peraturan Presiden tersebut dilaksanakan pada Bulan Maret 2019. Terhitung mulai Bulan Februari 2019 sesuai Penetapan Peraturan Presiden tersebut.

Selain itu, terjadi kenaikan Honorarium PPNPN di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-301/MK.01/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Usulan Satuan Biaya Lainnya pada Komisi Informasi Pusat besaran honorarium tenaga

administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebesar Rp 3.700.000,-.

Serta Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-807/MK.02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 menyebutkan besaran honorarium Tenaga Ahli dan Asisten Ahli pada Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut;

- Tenaga Ahli                      Rp 6.500.000,-
- Asisten Ahli                      Rp 4.500.000,-

Pada Tahun 2019 terbit Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 762 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Komisi Informasi Pusat menyebutkan bahwa Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut;

- Tenaga Ahli                      Rp 8.200.000,-
- Asisten Ahli                      Rp 6.200.000,-
- Sekretaris Ketua/Wakil KIP    Rp 5.300.000,-
- Tenaga Administrasi              Rp 5.300.000,-
- Pengolah Data Informasi        Rp 5.100.000,-

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan pembayaran terhitung mulai tanggal 01 April 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2019  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 31-12-19  
Halaman : 1

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT**  
**SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	114111	Belanja Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	1,377,418	
0	117111	Barang Konsumsi	152,878,156	
0	132111	Peralatan dan Mesin	3,669,720,716	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	49,473,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		3,182,861,739
0	162151	Software	266,949,999	
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		249,137,499
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		322,291,315
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		18,664,522
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		21,614,463,873
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,033,780	
0	391111	Ekuitas		674,096,789
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		3,000,000
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		555,000
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		5,686,830
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	845,181,700	
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,116	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		1,603
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50,449,344	
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,310,908	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	88,560,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,623,020	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	39,179,220	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	95,455,250	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	28,975,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		1,295,000
3	512111	Beban Uang Honor Tetap	2,486,600,000	
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,365,192,665	
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,317,064,716	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,534,248	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	179,010,000	
3	521211	Beban Bahan	777,831,348	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	422,984,000	
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	298,126,350	
3	522112	Beban Langganan Telepon	14,511,654	

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2019  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 31-12-19  
Halaman : 2

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT**  
**SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72,148,845	
3	522131	Beban Jasa Konsultan	142,313,200	
3	522141	Beban Sewa	4,935,671,706	
3	522151	Beban Jasa Profesi	465,300,000	
3	522191	Beban Jasa Lainnya	224,030,090	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	327,582,576	
3	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2,411,139
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,339,802,029	
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,056,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	354,666,000	
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		1,810,000
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,947,502,039	
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		5,053,223
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	205,399,365	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274,882,711	
3	592115	Beban Amortisasi Software	55,131,250	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	409,649,384	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	528,000	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	626,729	
		<b>J U M L A H</b>	<b>26,081,328,532</b>	<b>26,081,328,532</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2019  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 31-12-19  
Halaman : 1

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT**  
**SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	357,646,127	
0	219711	Utang Kepada KUN	4,033,780	
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		930,703,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		18,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		69,712,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		24,854,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		111,110,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		2,630,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		54,532,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		152,756,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		30,285,000
2	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap		2,500,300,000
2	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		1,075,635,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		3,317,650,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		11,000,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		186,380,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		788,719,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		425,220,000
2	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya		307,680,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		436,657,000
2	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges		150,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		18,000,000
2	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		73,000,000
2	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan		142,500,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		4,941,496,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		473,850,000
2	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya		225,100,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		312,100,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		1,361,455,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		147,700,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		357,130,000
2	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		2,965,888,000
2	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri		206,100,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		286,800,000
2	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya		35,000,000

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2019  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 31-12-19  
Halaman : 2

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT**  
**SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		3,000,000
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		1,033,780
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	847,768,660	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,142	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		1,603
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50,449,344	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,310,908	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	88,560,000	
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,623,020	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	39,324,060	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	100,921,000	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,335,000	
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		1,295,000
3	512111	Belanja Uang Honor Tetap	2,486,600,000	
3	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,049,428,560	
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,317,064,716	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,534,248	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	179,010,000	
3	521211	Belanja Bahan	777,831,348	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	422,984,000	
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	298,126,350	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	434,029,000	
3	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	150,000	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	14,511,654	
3	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72,148,845	
3	522131	Belanja Jasa Konsultan	142,313,200	
3	522141	Belanja Sewa	4,935,671,706	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	465,300,000	
3	522191	Belanja Jasa Lainnya	224,030,090	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	308,918,054	
3	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2,411,139
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,339,802,029	
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,056,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	354,666,000	
3	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		1,810,000

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2019  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 31-12-19  
Halaman : 3

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA** : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**ESELON I** : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROPINSI** : 0199 **INSTANSI PUSAT**  
**SATUAN KERJA** : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,947,502,039	
3	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		5,053,223
3	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	205,399,365	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285,849,500	
3	536111	Belanja Modal Lainnya	34,800,000	
		<b>J U M L A H</b>	<b>21,986,714,745</b>	<b>21,986,714,745</b>



**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2019**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: LSAIKB  
 Tanggal : 31/12/19  
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,377,418
Persediaan	152,878,156
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>154,255,574</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Peralatan dan Mesin	3,669,720,716
Aset Tetap Lainnya	49,473,000
Akumulasi Penyusutan	( 3,182,861,739)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>536,331,977</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	
Aset Tak Berwujud	266,949,999
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	( 249,137,499)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>17,812,500</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>708,400,051</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Utang kepada Pihak Ketiga	340,955,837
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>340,955,837</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>340,955,837</b>
<b>EKUITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
Ekuitas	367,444,214
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>367,444,214</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>708,400,051</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
<b>Beban Pegawai</b>				
511111 Beban Gaji Pokok PNS	845,181,700	787,905,080	57,276,620	7.26
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	14,513	11,850	2,663	22.47
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50,449,344	57,299,010	( 6,849,666)	( 11.95)
511122 Beban Tunj. Anak PNS	15,310,908	14,225,556	1,085,352	7.62
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	88,560,000	108,440,000	( 19,880,000)	( 18.33)
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	0	5,850,000	( 5,850,000)	( 100.00)
511125 Beban Tunj. PPh PNS	2,623,020	4,037,471	( 1,414,451)	( 35.03)
511126 Beban Tunj. Beras PNS	39,179,220	33,675,300	5,503,920	16.34
511129 Beban Uang Makan PNS	95,455,250	80,065,000	15,390,250	19.22
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	27,680,000	16,340,000	11,340,000	69.40
512111 Beban Uang Honor Tetap	2,486,600,000	1,123,600,000	1,363,000,000	121.30
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,365,192,665	1,150,770,498	214,422,167	18.63
Jumlah Beban Pegawai	<b>5,016,246,620</b>	<b>3,382,219,765</b>	<b>1,634,026,855</b>	<b>48.31</b>
<b>Beban Persediaan</b>				
593111 Beban Persediaan konsumsi	409,649,384	591,221,227	( 181,571,843)	( 30.71)
Jumlah Beban Persediaan	<b>409,649,384</b>	<b>591,221,227</b>	<b>( 181,571,843)</b>	<b>( 30.71)</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>Beban Barang dan Jasa</b>				
521111 Beban Keperluan Perkantoran	3,317,064,716	2,348,094,428	968,970,288	41.26
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,534,248	15,479,000	( 7,944,752)	( 51.32)
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	179,010,000	153,260,000	25,750,000	16.80
521211 Beban Bahan	777,831,348	384,091,408	393,739,940	102.51
521213 Beban Honor Output Kegiatan	422,984,000	175,414,200	247,569,800	141.13
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	298,126,350	804,661,685	( 506,535,335)	( 62.95)
522112 Beban Langganan Telepon	14,511,654	16,897,085	( 2,385,431)	( 14.11)
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72,148,845	71,647,103	501,742	0.70
522131 Beban Jasa Konsultan	142,313,200	0	142,313,200	0.00
522141 Beban Sewa	4,935,671,706	3,405,932,800	1,529,738,906	44.91
522151 Beban Jasa Profesi	465,300,000	312,760,000	152,540,000	48.77
522191 Beban Jasa Lainnya	224,030,090	0	224,030,090	0.00
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>10,856,526,157</b>	<b>7,688,237,709</b>	<b>3,168,288,448</b>	<b>41.21</b>
<b>Beban Pemeliharaan</b>				
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	325,171,437	396,208,252	( 71,036,815)	( 17.92)
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	528,000	1,851,500	( 1,323,500)	( 71.48)
593114 Beban Persediaan suku cadang	0	4,100,000	( 4,100,000)	( 100.00)
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>325,699,437</b>	<b>402,159,752</b>	<b>( 76,460,315)</b>	<b>( 19.01)</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>				
524111 Beban Perjalanan Biasa	1,339,802,029	1,242,656,923	97,145,106	7.81
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,056,000	314,275,000	( 167,219,000)	( 53.20)
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	352,856,000	429,353,905	( 76,497,905)	( 17.81)
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,942,448,816	2,150,621,084	791,827,732	36.81
524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	205,399,365	0	205,399,365	0.00
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>4,987,562,210</b>	<b>4,136,906,912</b>	<b>850,655,298</b>	<b>20.56</b>
<b>Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat</b>				
<b>Beban Bunga</b>				
<b>Beban Subsidi</b>				
<b>Beban Hibah</b>				
<b>Beban Bantuan Sosial</b>				
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>				
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274,882,711	323,612,724	( 48,730,013)	( 15.05)
592115 Beban Amortisasi Software	55,131,250	63,787,499	( 8,656,249)	( 13.57)
592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	114,996,243	( 114,996,243)	( 100.00)
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>330,013,961</b>	<b>502,396,466</b>	<b>( 172,382,505)</b>	<b>( 34.31)</b>
<b>Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>				
<b>Beban Transfer</b>				

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>Beban Lain-Lain</b>				
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>21,925,697,769</b>	<b>16,703,141,831</b>	<b>5,222,555,938</b>	<b>31.26</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>( 21,925,697,769)</b>	<b>( 16,703,141,831)</b>	<b>( 5,222,555,938)</b>	<b>( 31.26)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>				
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	67,615,000	( 67,615,000)	100.00
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,000,000	0	3,000,000	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>3,000,000</b>	<b>67,615,000</b>	<b>( 64,615,000)</b>	<b>( 95.56)</b>
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>				
596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	205,889,400	( 205,889,400)	( 100.00)
<b>Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>0</b>	<b>205,889,400</b>	<b>( 205,889,400)</b>	<b>( 100.00)</b>
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>3,000,000</b>	<b>( 138,274,400)</b>	<b>141,274,400</b>	<b>102.16</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
<b>Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>				
<b>Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>				
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>				
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	555,000	0	555,000	0.00
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,160,000	( 2,160,000)	( 100.00)
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5,686,830	2,179,313	3,507,517	160.94
<b>Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>6,241,830</b>	<b>4,339,313</b>	<b>1,902,517</b>	<b>43.84</b>
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>				
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	626,729	151,702	475,027	313.13
<b>Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>626,729</b>	<b>151,702</b>	<b>475,027</b>	<b>313.13</b>
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>5,615,101</b>	<b>4,187,611</b>	<b>1,427,490</b>	<b>34.08</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>8,615,101</b>	<b>( 134,086,789)</b>	<b>142,701,890</b>	<b>( 106.40)</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>Beban Luar Biasa</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	( 21,917,082,668)	( 16,837,228,620)	( 5,079,854,048)	( 30.17)

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	5,016,246,620	3,382,219,765	1,634,026,855	48.31
Beban Persediaan	409,649,384	591,221,227	( 181,571,843)	( 30.71)
Beban Barang dan Jasa	10,856,526,157	7,688,237,709	3,168,288,448	41.20
Beban Pemeliharaan	325,699,437	402,159,752	( 76,460,315)	( 19.01)
Beban Perjalanan Dinas	4,987,562,210	4,136,906,912	850,655,298	20.56
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	330,013,961	502,396,466	( 172,382,505)	( 34.31)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>21,925,697,769</b>	<b>16,703,141,831</b>	<b>5,222,555,938</b>	<b>31.26</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	( 21,925,697,769)	( 16,703,141,831)	( 5,222,555,938)	( 31.26)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,000,000	67,615,000	( 64,615,000)	( 95.56)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	205,889,400	( 205,889,400)	( 100.00)
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>3,000,000</b>	<b>( 138,274,400)</b>	<b>141,274,400</b>	<b>102.16</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,241,830	4,339,313	1,902,517	43.84
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	626,729	151,702	475,027	313.13
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>5,615,101</b>	<b>4,187,611</b>	<b>1,427,490</b>	<b>34.08</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>8,615,101</b>	<b>( 134,086,789)</b>	<b>142,701,890</b>	<b>( 106.40)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	<b>( 21,917,082,668)</b>	<b>( 16,837,228,620)</b>	<b>( 5,079,854,048)</b>	<b>( 30.17)</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>EKUITAS AWAL</b>	674,096,789	1,164,330,079	( 490,233,290)	( 42.10)
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	( 21,917,082,668)	( 16,837,228,620)	( 5,079,854,048)	30.17
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
391114 Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
391119 Koreksi Lainnya	0	0	0	0.00
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	0	0	0	0.00
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0.00
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0	0.00
311315 Penyesuaian SAL BLU	0	0	0	0.00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>21,610,430,093</b>	<b>16,346,995,330</b>	<b>5,263,434,763</b>	<b>32.19</b>
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	21,614,463,873	16,418,315,558	5,196,148,315	31.64
313121 Diterima Dari Entitas Lain	( 4,033,780)	( 71,320,228)	67,286,448	( 94.34)
313211 Transfer Keluar	0	0	0	0.00
313221 Transfer Masuk	0	0	0	0.00
313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0	0	0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0	0	0.00
391141 Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>( 306,652,575)</b>	<b>( 490,233,290)</b>	<b>183,580,715</b>	<b>( 37.44)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>367,444,214</b>	<b>674,096,789</b>	<b>( 306,652,575)</b>	<b>( 45.49)</b>



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT  
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST  
 Tanggal : 31 Desember 2019  
 Halaman : 1  
 Prog.Id : lu\_pastkt

No	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	4,033,780	4,033,780	0.00	0	71,320,228	71,320,228	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	4,033,780	4,033,780	0.00	0	71,320,228	71,320,228	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>4,033,780</b>	<b>4,033,780</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>71,320,228</b>	<b>71,320,228</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>								
B.1.1	Rupiah Murni	21,972,110,000	21,614,463,873	( 357,646,127)	98.37	16,750,702,000	16,418,315,558	( 332,386,442)	98.02
B.1.1.a	Belanja Pegawai	4,952,535,000	4,709,040,091	( 243,494,909)	95.08	3,558,798,000	3,369,234,186	( 189,563,814)	94.67
B.1.1.b	Belanja Barang	16,697,775,000	16,584,774,282	( 113,000,718)	99.32	12,937,034,000	12,797,308,873	( 139,725,127)	98.92
B.1.1.c	Belanja Modal	321,800,000	320,649,500	( 1,150,500)	99.64	254,870,000	251,772,499	( 3,097,501)	98.78
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>21,972,110,000</b>	<b>21,614,463,873</b>	<b>( 357,646,127)</b>	<b>98.37</b>	<b>16,750,702,000</b>	<b>16,418,315,558</b>	<b>( 332,386,442)</b>	<b>98.02</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT  
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST  
 Tanggal : 31 Desember 2019  
 Halaman : 2  
 Prog.Id : lu\_pastkt

No	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
 SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>EKUITAS AWAL</b>	674,096,789	1,164,330,079	( 490,233,290)	( 42.10)
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	( 21,917,082,668)	( 16,837,228,620)	( 5,079,854,048)	30.17
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI  EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI  DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN  AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	21,610,430,093	16,346,995,330	5,263,434,763	32.19
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	( 306,652,575)	( 490,233,290)	183,580,715	( 37.44)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	367,444,214	674,096,789	( 306,652,575)	( 45.49)